

Community Empowerment in the Preparation of Coastal Area Masterplans in Bontang Utara District

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyusunan Masterplan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bontang Utara

Pandu K. Utomo^{1*}, Dharwati P. Sari², Putri Nopianti¹, Kartika Santoso¹, Agel Awinuwu M¹

¹ Program Studi S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda

² Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, Samarinda

* Alamat Koresponding. E-mail: pandukutomo@ft.unmul.ac.id.

Direvisi: 01 Mei 2025

Dikirim: 19 Agustus 2025

Diterima: 22 Agustus 2025

Academic Editor: Dr. Islamudin Ahmad

Catatan Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam gambar ataupun rancangan yang diterbitkan pada jurnal ini.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT: The problem of slum settlements is one of the issues in the coastal areas of densely populated residential areas in Bontang City. The preparation of a masterplan for the coastal area of North Bontang District is very important to prevent the expansion of slum areas in this district. This community service activity was carried out to assist policy makers in the preparation of the master plan. The PkM team provided assistance in the preparation of this master plan by providing insights and knowledge according to the competencies of the team members. Stakeholder involvement was very significant in this activity. The results of this mentoring activity were a very high level of participation and produced a master plan report that strongly supports the Bontang City Government program.

KEYWORDS: Community service; Slum Area; Coastal Area; Masterplan

ABSTRAK: Permasalahan permukiman kumuh merupakan salah satu isu di wilayah pesisir di kawasan permukiman yang padat di kota Bontang. Penyusunan masterplan Kawasan Pesisir Kecamatan Bontang Utara menjadi sangat penting untuk mencegah meluasnya area kumuh di kawasan ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk mendampingi para pemangku kebijakan dalam penyusunan masterplan. Tim PkM melakukan pendampingan penyusunan masterplan ini dengan memberikan wawasan dan pengetahuan sesuai dengan kompetensi anggota tim kepada. Keterlibatan pemangku kepentingan sangat besar dalam kegiatan ini. Hasil dari kegiatan pendampingan ini ialah tingkat partisipasi yang sangat tinggi dan menghasilkan laporan masterplan yang sangat mendukung program Pemerintah Kota Bontang.

Kata Kunci: Pengabdian kepada Masyarakat; Kawasan Kumuh; Kawasan Pesisir; Masterplan

1. PENDAHULUAN

Sebagai sebuah permasalahan yang banyak ditemukan di kawasan perkotaan, permukiman kumuh menjadi salah satu aspek prioritas untuk diselesaikan (Andiyan & Gunawan, 2018). Kajian yang berkaitan dengan permukiman kumuh (*slum area*) pada umumnya mencakup kondisi fisik, kondisi sosial – ekonomi – budaya masyarakatnya, dan gabungan dari dua kondisi tersebut (Joenso & Sari, 2020). Kondisi fisik suatu permukiman kumuh dapat dilihat dari kondisi bangunan gedung dan sarana yang ada di sekitarnya. Biasanya bangunan gedung tersusun sangat rapat, kualitas konstruksinya rendah, jaringan jalan tidak berpola dengan kualitas yang rendah, kondisi sanitasi umum dan drainase yang tidak standar, serta belum memadainya pengelolaan sampah. Kondisi fisik tersebut sangat sering dijumpai di negara yang sedang berkembang (Sari & Ridlo, 2022). Salah satu penataan yang perlu dilakukan adalah kawasan tepi sungai (Hadinata et al., 2016) dengan mempertimbangkan karakter kawasan dan pengentasan permukiman kumuh.

Cara mensitasi artikel ini: Utomo, S., Sari, D.P., Nopianti, P., Santoso, K., Awinuwu, A. Pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan masterplan kawasan pesisir di Kecamatan Bontang Utara. ANDIL Mulawarman J Comm Engag. 2025; 2(4): 158-164.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh, pemerintah telah menginisiasi kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan permukiman yang lebih layak dan sehat. Di Kota Bontang, gerakan penanganan kawasan kumuh telah melalui proses yang sangat dinamis, menjadi daya tarik bagi masyarakat terutama kaum migran. Disisi lain, peningkatan jumlah penduduk berpotensi menjadikan Kota Bontang semakin padat dan menjadikan kawasan permukiman menjadi lingkungan hunian yang tidak layak huni. Tanjung Limau menjadi lokasi salah satu yang tinggi tingkat kekumuhan di Kota Bontang dikarenakan keterbatasan akses infrastruktur, kondisi sanitasi yang tidak memadai, tidak tersedianya saluran drainase yang layak serta pengelolaan sampah serta proteksi kebakaran yang terbatas.

Revitalisasi dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mendorong dan mengarahkan pembangunan melalui optimalisasi sumber daya suatu kawasan atau tempat agar menjadi lebih hidup dan bernilai (Prabowoningsih et al., 2018; Susanti & Suprihatmi, 2018; Widyawati, 2018). Dalam konteks ini, sumber daya suatu tempat tidak hanya bersifat fisik, tetapi secara menyeluruh mencakup komponen-komponen alam dan manusia, di mana interaksi antar komponen itu melibatkan aktivitas ekonomi, sosial dan budayanya (Dhiksha & A, 2024; Ratriningsih, 2017). Strategi penataan dan pengembangan RT 01, RT 02, dan RT 26 Kecamatan Bontang Utara merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan memperhatikan kondisi eksisting yang kumuh dan tidak layak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam konteks upaya bersama dari berbagai pihak untuk berkontribusi mengurangi kawasan permukiman kumuh. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini ialah pendampingan pembuatan masterplan kawasan di Kecamatan Bontang Utara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, masyarakat, dan akademisi.

Pengabdian ini dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat yang ikut peduli dalam melakukan penataan dan lingkungan sekitar laut. Masterplan yang disusun akan mendukung upaya revitalisasi dengan dukungan warga setempat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas permukimannya dan di kemudian hari dapat menjaga lingkungannya. Peran ahli arsitektur, perencanaan wilayah kota, dan manajemen konstruksi (teknik sipil) sangat besar dalam bentuk kolaborasi yang mempertimbangkan nilai kearifan lokal. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sangat bergantung kepada kegiatan pendampingan baik di tahap perencanaan maupun pelaksanaannya (Afdholi, 2017; Hadinata & Mentayani, 2018).

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan kualitas kawasan meningkat, sehingga fungsi dan fisik kawasan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Dengan keterlibatan masyarakat dan semua *stakeholder*, desain masterplan yang menjadi landasan revitalisasi kawasan ini tetap memperhatikan kondisi lokal dengan memperhatikan keserasian dengan alam sekitarnya. Proses penyusunan masterplan juga mempertimbangkan terbentuknya kinerja fungsional antar lembaga terkait dalam pelaksanaan penataan kawasan. Proses penyusunan masterplan dan pelaksanaan revitalisasi secara tidak langsung juga akan dapat menjadi salah satu *best practice* yang dapat ditiru daerah lain, khususnya masyarakat, Pemda dan akademisi yang memiliki upaya sama dalam hal pengentasan kawasan permukiman kumuh.

2. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan tahapan observasi lapangan. Setelah tahapan tersebut, proses wawancara dilakukan dengan teknik wawancara mendalam sehingga diperoleh data yang saling mendukung. Setelah pengumpulan foto kondisi eksisting, dilakukan pemetaan citra kawasan RT 01, RT 02, dan RT 26 Kecamatan Bontang Utara. Hasil wawancara mendalam kemudian dijadikan acuan dalam proses pembuatan masterplan dan pelaksanaan revitalisasi. Penataan kawasan mengacu pada permintaan pemda dalam hal ini Dinas Permukiman, dan Pertanahan kota Bontang, tokoh masyarakat, dan camat Bontang Utara.

Pendampingan penyusunan Masterplan dibagi menjadi 3 tahap untuk memudahkan implementasi di lapangan. Tahap pertama ialah pengumpulan data yang lengkap dan dilanjutkan proses analisis data. Dalam pengumpulan data, tim melakukan survei untuk mengumpulkan informasi berupa foto, video drone, catatan, dan rekaman dari masyarakat sekitar. Tahap ini diselesaikan dalam 2 hari.

Tahap kedua ialah FGD untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Masukan dan saran diperoleh melalui rapat kecil di lapangan. Setelah rapat kecil yang melibatkan masyarakat, FGD dilaksanakan di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota yang dihadiri 35 peserta dari berbagai latar belakang. Para peserta terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, Camat, Lurah, Ketua RT, dan tim PkM yang terlibat.

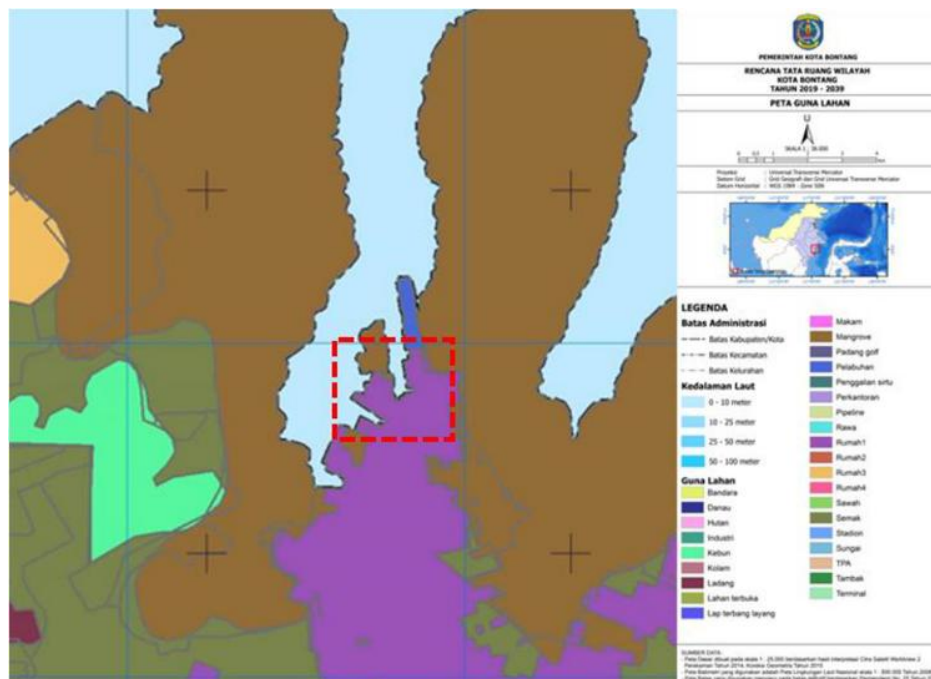
Tahap terakhir ialah sosialisasi hasil masterplan dalam sebuah pertemuan. Pertemuan ini diisi dengan presentasi di hadapan Pemkot Bontang dan masyarakat. Tim PKM yang terlibat dalam kegiatan ini melakukan tugasnya masing-masing sesuai kompetensi dan pengalaman masing-masing anggota tim.

Pelaksanaan kegiatan focus group discussion (FGD) dengan tujuan menyerap aspirasi dan gagasan dari pihak terkait. FGD akan dilakukan di awal dan akhir kegiatan. Di awal kegiatan FGD akan menjadi wadah penyamaan persepsi dan memunculkan ide awal. FGD akhir merupakan kegiatan sosialisasi hasil kegiatan PkM kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Observasi lapangan dan wawancara

Dalam kegiatan awal ini didapatkan berdasarkan RTRW Kota Bontang 2019-2039, tata guna lahan di Kawasan Tanjung Limau terdiri dari area permukiman, pelabuhan, dan mangrove. Ketiga fungsi tersebut mencakup keseluruhan wilayah Kawasan Tanjung Limau yang memiliki luas total 11,03 Hektar. Zonasi tata guna lahan kawasan ini dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Tata Guna Lahan Kawasan Tanjung Limau (Sumber: RTRW Kota Bontang 2019-2039)

Proses observasi diawali dengan pengukuran elemen-elemen fisik kawasan. Observasi ini berguna dalam mencari data fisik dan non fisik. Selanjutnya dilakukan kegiatan perekaman gambar dengan kamera, drone, video, dan pembuatan sketsa dalam rangka memperkuat kelengkapan data. Beberapa dokumentasi dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. Gambar 2 memperlihatkan kondisi permukiman yang berada di bantaran sungai. Beberapa hal yang berkaitan dengan visual kawasan antara lain banyaknya kapal nelayan yang parkir di sepanjang koridor jalan lingkungan. Selain itu, rumah-rumah yang ada di kawasan ini berupa rumah panggung. Jalan lingkungan memiliki lebar antara 1,2 meter hingga 2 meter dan terbuat dari konstruksi kayu. Terdapat beberapa jalan lingkungan yang berupa beton bertulang dengan lebar jalan rata-rata 2,4 meter.



Gambar 2. Kondisi eksisting (Sumber: Survei Tim PkM, 2024)

Observasi juga dilakukan dengan pemetaan menggunakan Drone. Hasil observasi ini berupa gambaran tampak atas kawasan. Situasi kawasan yang tergambar antara lain padatnya lingkungan permukiman dan jarak unit hunian yang sangat dekat dengan bantaran sungai. Bahkan di beberapa titik, unit rumah berada di atas sungai. Pemetaan dilanjutkan dengan wawancara dengan warga dan tokoh masyarakat setempat.



Gambar 3. Dokumentasi survei dan wawancara (sumber: Survei Tim PkM, 2024)

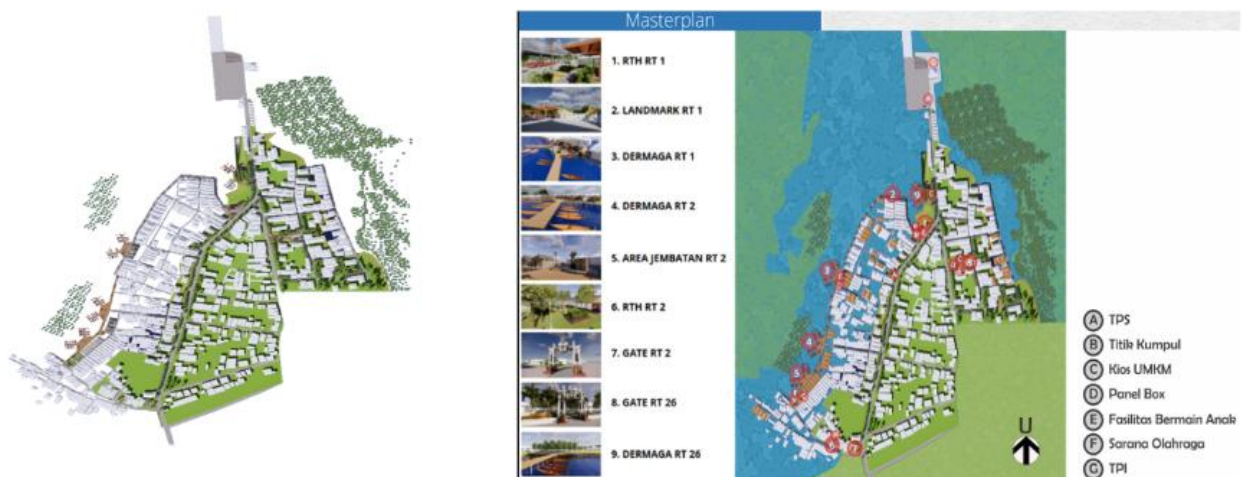
3.2. Pendampingan dan Penyusunan Masterplan Kawasan Pesisir Bontang Utara

Kegiatan diskusi yang dilakukan mulai dari tahap observasi, tahap nalaisis, hingga tahap perancangan masterplan dilakukan tim dengan mempertimbangkan permasalahan, kebutuhan, potensi, dan isu yang ada di lapangan. Kegiatan ini melibatkan ketua RT 01, Ketua RT 02, dan Ketua RT 26, Dinas PKPP Kota Bontang dan masyarakat dilakukan setelah tim PKM turun ke lapangan. Pada akhirnya kegiatan ini akan melahirkan konsep desain berupa produk desain awal. Desain awal ini berupa rancangan masterplan yang masih sebatas blok plan dan zonasi tapak secara makro.

Konsep desain awal kemudian diolah kembali dan dipadukan dengan gagasan dan ide serta data-data yang diperoleh dari pemangku, tokoh, dan masyarakat lainnya. Hasilnya, konsep desain menjadi lebih memiliki nilai kuat dalam pengembangan kawasan permukiman di Bontang Utara karena keterlibatan masyarakatnya secara langsung dalam penyusunannya. Desain ini kemudian dikonsultasikan dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang untuk memperoleh berbagai masukan ide, saran, maupun koreksi yang konstruktif berkenaan dengan desain yang telah selesai dilakukan. Finalisasi desain disempurnakan dan dituangkan dalam dokumen akhir pengabdian kepada masyarakat. Berikut hasil gambar desain



Gambar 4. Konsep Pengembangan Kawasan (sumber: Tim PkM, 2024)



Gambar 5. Masterplan Kawasan (Sumber: Tim PkM, 2024)



Gambar 6. Dokumen 3D RTH RT 01 (Sumber: Tim PkM, 2024)

3.3. Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Akhir

FGD Akhir dilakukan sebagai kegiatan sosialisasi hasil kegiatan PkM kepada masyarakat di Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan Masterplan telah mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan dan disepakati oleh stakeholder dan mencapai kesepakatan mengenai rencana penataan dan pembangunan yang akan diwujudkan berdasarkan Dokumen Masterplan yang akan disahkan.



Gambar 7. Dokumentasi FGD Akhir (Sumber: Tim PkM, 2024)

4. KESIMPULAN

Pendampingan penyusunan Masterplan kawasan pesisir di Kecamatan Bontang Utara merupakan kegiatan yang sangat penting dan mendesak karena area ini merupakan kawasan kumuh dan aspek kekumuhannya terus bertambah seiring waktu. Untuk mencegah semakin parahnya kawasan kumuh di area ini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan melibatkan akademisi. Kegiatan pendampingan penyusunan masterplan ini dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini diikuti oleh pemangku kebijakan dan masyarakat di sekitar kecamatan Bontang Utara. Partisipasi aktif para pemangku kebijakan tersebut diterapkan dengan rapat kecil di lokasi dan FGD di kantor Dinas PUPR. Dengan dilakukannya PkM ini, Kecamatan Bontang Utara memiliki perencanaan dan dokumen masterplan yang tepat dalam penataan kawasan pesisir khususnya kawasan permukimannya. Manfaat dari kegiatan ini juga berupa terjaganya substansi masterplan dengan adanya masukan pakar dari pihak akademisi yang ada di dalam tim PM.

Ucapan Terima Kasih: -

Kontribusi Penulis: Seluruh penulis berkontribusi selama pelaksanaan kegiatan PkM dan penyusunan penulisan artikel.

Sumber Pendanaan: -

Konflik Kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan

REFERENSI

- Afdholy, A. R. (2017). Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin. *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 9(1), 33–50. <https://doi.org/10.26905/lw.v9i1.1865>
- Andiyan, & Gunawan, F. I. (2018). Penataan Kawasan Kumuh (Kewenangan Provinsi) di Desa Tanjung Anom Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. *Jurnal Arsitektur Archicentre*, June.
- Dhiksha, & A, M. (2024). Cultural and Regional Influences on Aesthetic and Functional Architecture. *International Journal of Architecture (IJA)*, 10(1), 1–46. <https://iaeme.com/Home/issue/IJA?Volume=10&Issue=1>
- Hadinata, I. Y., & Mentayani, I. (2018). Karakter Arsitektur Tepi Sungai Di Kampung Sasirangan Kota Banjarmasin. *Info-Teknik*, 19(1), 87. <https://doi.org/10.20527/infotek.v19i1.5144>
- Hadinata, I. Y., Setiawan, B., & Prayitno, B. (2016). Transformasi Ruang Permukiman Tradisional Dan Vernakular Dalam Lingkungan Rawa Pasang Surut. *Seminar Nasional Kearifan Lokal Dalam Arsitektur Dan Lingkungan Binaan*.
- Joenso, R. C., & Sari, S. R. (2020). Klasifikasi kekumuhan dan konsep penanganan permukiman kumuh perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Lampu Satu, Merauke). *Arcade*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.31848/arcade.v4i2.366>
- Prabowoningsih, N. H., Putri, R. A., Rini, E. F., Prabowoningsih, Hayu, N., Putri, R. A., & Rini, E. F. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 13(2), 133. <https://doi.org/10.20961/region.v13i2.21158>
- Ratriningsih, D. (2017). *Arahan Penataan Kampung Tradisional Wisata Batik*. XIII(2), 116–128. <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/view/17175>
- Sari, A. R. S., & Ridlo, M. A. (2022). Studi Literature : Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2), 160. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20022>
- Susanti, R., & Suprihatmi, S. (2018). Peran Pemerintah Dalam Memediasi Pengembangan Cluster Branding Kawasan Ngarsopuro untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif Kota Solo. *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.26805/jmkli.v2i1.11>
- Widyawati, C. (2018). Peranan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata Heritage di Trowulan. *Jurnal Pariwisata*, 5(2), 83–94. <https://doi.org/10.31311/par.v5i2.3489>

This is an open access article which is publicly available on our journal's website under Institutional Repository at <https://e-journals2.unmul.ac.id/index.php/ANDIL/index>